

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO MACHDJUD MODOPURO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

Jl. Cempaka Putih Barat 13 No. G.10 Jakarta 10520 (Pusat)
Jl. Purnawirawan No. 128 Bandar Lampung Telp. 0721-560 9431 (Cabang)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LAPORAN KEUANGAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



SURAT PERNYATAAN REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. As'ad, M.Pd.
Alamat : Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren,
Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, Prov. Jambi 36363
Jabatan : Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Laporan Keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak mengandung informasi/fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Materai 10.000

Prof. Dr. As'ad, M.Pd.

Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, 23 Februari 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i
Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Operasional	5
Laporan Arus Kas	6
Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8
Lampiran	
- Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
- Pendapatan Diterima Dimuka	



NO: 00048/3.0385/AU.5/11/1558-3/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, Prov. Jambi,
36363**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi** ("Universitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca **UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi** tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN**

Keputusan Menteri Keuangan RI No. : KEP-1021/KMK.17/1998; 658/KM.1/2018; 79/KM.1/2019; 509/KM.1/2019

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307

Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320; Telp.: 3151534, 42882576; Facs.: 42882577; E-mail : kaptim@rad.net.id



Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan
Partner,**



Dr. Einde Evana, S.E, M. Si., Ak., CA., CPA.

NIKAP KEP 1021/KM.VI/1998

NIKAP Cab 658/KM.1/2018

NIAP 1558

Jambi, 23 Februari 2024



Cabang Bandar Lampung

Jl. Purnawirawan Raya No. 128, Gunung Terang,
Langkapura, Bandar Lampung, Lampung 35152
Telp.: (0721) 5609431; Facs.: (0721) 5609431;
E-mail : eindeevana@yahoo.com

Cabang Denpasar

Jl. Drupadi XIV No. 3, Sumerta Kelod,
Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80235
Telp.: (0361) 4745880; Facs.: (0361) 4745880;
E-mail : kap.tjahjodenpasar@gmail.com

Cabang Bogor

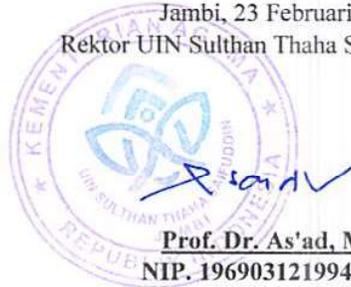
Jl. Raya Karanggan No. 234, Karanggan,
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16960
Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724156;
E-mail : pujihantomo.kap@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Tahun 2023		Tahun 2022
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan Negara dan Hibah			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	74.114.280.000	90.607.981.741	79.913.047.827
JUMLAH PENDAPATAN	74.114.280.000	90.607.981.741	79.913.047.827
BELANJA NEGARA			
Belanja Pegawai	69.199.301.000	68.909.731.276	65.273.516.740
Belanja Barang	105.354.760.000	97.091.535.908	90.424.567.415
Belanja Modal	8.022.892.000	7.204.019.843	181.238.994.720
Belanja Sosial	15.602.400.000	15.602.400.000	11.774.400.000
JUMLAH BEBAN	198.179.353.000	188.807.687.027	348.711.478.875
SILPA/SIKPA	(124.065.073.000)	(98.199.705.286)	(268.798.431.048)
SURPLUS/DEFISIT	(124.065.073.000)	(98.199.705.286)	(268.798.431.048)

Jambi, 23 Februari 2024
 Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. As'ad, M.Pd.
 NIP. 196903121994021001

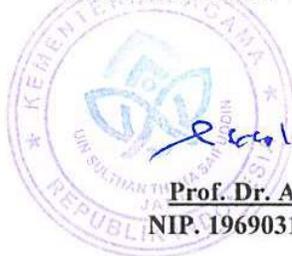
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH	
	2023	2022
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	34.847.480.065	27.917.324.624
PENGGUNAAN SAL	-	-
Sub Total	34.847.480.065	27.917.324.624
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(98.199.705.286)	(268.798.431.048)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	98.018.578.635	275.631.733.300
Pendapatan Alokasi APBN	103.462.632.664	276.009.125.870
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(5.444.054.029)	(377.392.570)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian	(181.126.651)	6.833.302.252
Sub Total	(181.126.651)	6.833.302.252
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	34.666.353.414	34.750.626.876

Jambi, 23 Februari 2024

Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. As'ad, M.Pd.
 NIP. 196903121994021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023 Audited	2022 Audited
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.1, 5a	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	8.1, 5b	34.666.353.414	34.847.480.065
Kas Lainnya dan Setara kas	8.1, 5c	1.139.289.573	621.452.600
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	8.2, 5d	382.128.000	458.533.500
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	8.3, 5e	42.500.000	82.500.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	8.3, 5e	(42.500.000)	(41.250.000)
Persediaan Badan Layanan Umum	8.5, 5f	545.605.756	617.116.028
Jumlah Aset Lancar		36.733.376.743	36.585.832.193
ASET TETAP			
Tanah	8.7a, 5g	373.107.997.000	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	8.7b, 5g	126.270.713.370	121.952.647.980
Gedung dan Bangunan	8.7c, 5g	655.184.525.948	652.385.105.745
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.7d, 5g	17.236.718.413	16.063.019.923
Aset Tetap Lainnya	8.7e, 5g	6.191.718.397	6.021.813.197
Konstruksi dalam Pengerjaan	8.7f, 5g	22.134.422.038	22.035.065.938
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8.7, 5g	(117.963.300.061)	(81.721.446.456)
Jumlah Aset Tetap		1.082.162.795.105	1.109.844.203.327
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	8.8a, 5h	3.377.415.720	3.377.415.720
Aset Lain-lain (YTDDOP)	8.8b, 5h	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	5h	(1.920.720.500)	(1.741.548.750)
Jumlah Aset Lainnya		1.456.695.220	1.635.866.970
JUMLAH ASET		1.120.352.867.068	1.148.065.902.490

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023 Audited	2022 Audited
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	9.1, 5i	1.349.471.077	1.206.414.379
Pendapatan Diterima di Muka	9.1, 5j	125.375.000	103.902.777
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.474.846.077	1.310.317.156
JUMLAH KEWAJIBAN		1.474.846.077	1.310.317.156
EKUITAS			
Ekuitas	10, 5k	1.118.878.020.991	1.146.755.585.334
JUMLAH EKUITAS		1.118.878.020.991	1.146.755.585.334
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.120.352.867.068	1.148.065.902.490

Jambi, 23 Februari 2024
Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. As'ad, M.Pd.
NIP. 196903121994021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Catatan	2023 Audited	2022 Audited
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan dari Alokasi APBN	5, 6a	103.462.632.664	276.009.125.870
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5, 6a	80.259.921.452	78.898.881.110
Pendapatan Hibah BLU	5, 6a	1.650.000.000	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5, 6a	285.575.535	147.861.740
Pendapatan BLU Lainnya	5, 6a	1.494.690.142	981.476.952
JUMLAH PENDAPATAN		187.152.819.793	356.037.345.672
BEBAN			
Beban Pegawai	7, 6b, 1	107.553.139.172	101.374.099.940
Beban Persediaan	7, 6b, 2	2.533.108.409	805.478.989
Beban Barang dan Jasa	7, 6b, 3	41.902.104.729	40.740.334.650
Beban Pemeliharaan	7, 6b, 4	3.576.903.800	4.172.186.228
Beban Perjalanan Dinas	7, 6b, 5	9.947.190.265	9.544.304.692
Beban Bantuan Sosial	7, 6b, 6	15.602.400.000	11.774.400.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7, 6b, 7	36.416.045.355	23.475.485.243
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7, 6b, 8	1.250.000	41.250.000
JUMLAH BEBAN		217.532.141.730	191.927.539.742
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(30.379.321.937)	164.109.805.930
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	6c, 1	210.627.000	27.300.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	6c, 1	-	(151.238.098)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR		210.627.000	(123.938.098)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	6c, 2	5.728.289.889	499.689.304
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	6c, 2	(5.444.054.029)	(377.392.570)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		284.235.860	122.296.734
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(29.884.459.077)	164.108.164.566

Jambi, 23 Februari 2024

Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. As'ad, M.Pd.

NIP. 196903121994021001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2023 Audited	2022 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan dari Alokasi APBN	103.462.632.664	276.009.125.870
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	81.860.091.031	78.440.347.610
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	274.566.535	147.861.740
Pendapatan dari Hibah	1.547.567.832	-
Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000.000	797.849.173
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	481.702.314	149.596.734
Pendapatan PNPB Umum	5.233.427.029	350.092.570
JUMLAH ARUS MASUK KAS	193.859.987.405	355.894.873.697
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	107.550.290.438	101.374.099.940
Pembayaran Barang	21.192.783.786	21.646.161.911
Pembayaran Jasa	11.522.948.788	8.879.065.718
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	2.502.614.137	1.196.180.310
Pembayaran Pemeliharaan	3.576.903.800	4.172.186.228
Pembayaran Perjalanan Dinas	9.947.190.265	9.544.304.692
Pembayaran Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.708.535.970	8.886.085.356
Pembayaran Bantuan Sosial	15.602.400.000	11.774.400.000
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	5.444.054.029	377.392.570
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	187.047.721.213	167.849.876.725
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	6.812.266.192	188.044.996.972
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Penjualan atas aset tetap lainnya/ Aset Lainnya	210.627.000	27.300.000
JUMLAH ARUS MASUK KAS	210.627.000	27.300.000
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	4.202.184.999	80.569.593.657
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.658.231.154	99.546.992.986
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.173.698.490	761.708.077
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	169.905.200	360.700.000
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	7.204.019.843	181.238.994.720
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(6.993.392.843)	(181.211.694.720)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.139.289.573	3.947.263.913
JUMLAH ARUS MASUK KAS	1.139.289.573	3.947.263.913
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	621.452.600	3.591.804.513
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	621.452.600	3.591.804.513
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	517.836.973	355.459.400
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	336.710.322	7.188.761.652
SALDO AWAL KAS	35.468.932.665	28.280.171.013
SALDO AKHIR KAS	35.805.642.987	35.468.932.665

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023 Audited	2022 Audited
EKUITAS AWAL	<i>10, 8a</i>	1.148.269.399.944	982.590.534.190
SURPLUS/DEFISIT - LO	<i>10, 8b</i>	(29.884.459.077)	164.108.164.566
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	<i>10</i>		
Koreksi Nilai Persediaan	<i>10, 8c</i>	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	<i>10, 8d</i>	-	5.529.432
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	<i>10, 8e</i>	(4.980.000)	33.857.146
Koreksi Lain-lain	<i>10, 8f</i>	498.060.124	17.500.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		493.080.124	56.886.578
EKUITAS AKHIR	<i>10, 8g</i>	1.118.878.020.991	1.146.755.585.334

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Pendirian

Badan Layanan Umum (BLU) disahkan menjadi satker BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017. BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara kelembagaan merupakan perguruan tinggi milik dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Agama.

BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengalami 5 (lima) tahap perkembangannya sebagai berikut:

1. Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI)
2. Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
5. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Satuan kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak tanggal 17 November 2009 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009.

b. Tempat dan Kedudukan

Badan Layanan Umum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berlokasi di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni: 1) Kampus 1 (satu) berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124; 2) Kampus 2 (dua) yakni Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36363.

c. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Barang/Jasa Pada BLU.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 492/kmk.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan PPK-BLU.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama.
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

d. Visi dan Misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

VISI

Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah "Menjadi Universitas Islam Sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional Dengan Semangat Moderasi dan *Entrepreneurship Islam*".

MISI

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat entrepreneurship Islami.
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik *Times Higher Education* dan *Webometrics*.
7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.
8. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

e. Tujuan dan Sasaran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TUJUAN

1. Memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu keislaman dan ilmu terkait dan memiliki semangat entrepreneurship Islami;
3. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan;
4. Menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat entrepreneurship Islami dan membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan.

SASARAN

1. Diperolehnya Akreditasi Unggul serta masuknya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di tingkat Dunia;
2. Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Tata Kelola Sumber Daya berlandaskan etika dan berbasis teknologi informasi untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 serta Tata kelola Sistem Manajemen Keuangan (BLU dan lainnya).
3. Meningkatnya Produktivitas, Budaya dan Kualitas Riset, Inovasi dan Pengabdian kepada masyarakat.
4. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik *Times Higher Education* pada aspek *International Outlook*.

f. Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Struktur Dewan Pengawas BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas	: Dr. H. Rohmat Mulyana, M. Pd
Anggota	: Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A. : Dr. Sri Rahayu, SE, MSA, Ak, CA

Susunan Pengelola BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Dr. As'ad, M.Pd
Wakil Rektor I	: Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.E.I.
Wakil Rektor II	: Dr. As'Ad Isma, M.Pd
Wakil Rektor III	: Dr. Bahrul Ulum, M.A.
Dekan Fak. Syariah	: Sayuti, S.Ag., MH
Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan	: Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd
Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi	: Dr. Zulqarnin, M.Ag
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	: Dr. A.A. Miftah, M.Ag
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi	: Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag
Dekan Fak. Sains dan Teknologi	: Iskandar, M.Pd., Ph.D
Dekan Fak. Adab dan Humaniora	: Dr. Halimah Dja'far, M.Fil.I
Direktur Pasca Sarjana	: Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag
Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI)	: Dr. Novi Mubyarto, M.E.

Sedangkan Struktur Pengelolaan Keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rektorat	: Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FS	: Dr. Sayuti, S.Ag., MH
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FTK	: Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FDIK	: Dr. Zulqarnin, M.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FEBI	: Dr. A.A. Miftah, M.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FUSA	: Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FST	: Iskandar, M.Pd., Ph.D
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FAH	: Dr. Halimah Dja'far, M.Fil.I
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pascasarjana	: Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag
Pejabat Penandatanganan SPM	: Ratna Sumarni, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Pitriani, S.Ag
Bendahara Penerimaan	: Nora Maulidya, S.HI

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pokok-pokok kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Laporan keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2023, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang serta Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL. Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SII.PA/SIKPA koreksi dan SAL akhir;
- Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas;
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-I.O, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas;
- Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh entitas selama Tahun Anggaran 2023;
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir; dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penerapan Accrual Basis digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan penerapan Cash Basis untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Accrual Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Cash Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasar basis kas sehingga pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas.

Basis akrual di Neraca pada Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Dasar Pengukuran

Kriteria pengakuan didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Entitas. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Entitas menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana BLU beroperasi.

3. Periode Akuntansi

Periode penyajian Laporan Keuangan berdasarkan tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Tahun Anggaran 2023 dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

4. Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara (KUN). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SII.PA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata

uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

5. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO diakui pada saat:

- BLU UIN memiliki hak atas pendapatan;
- BLU UIN menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan – LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

6. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

7. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Timbulnya Konsumsi aset;
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar dapat diakui sebagai beban.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional entitas.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyisihan piutang tak terbagih, serta beban penyusutan dan amortisasi.

8. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, diharapkan dapat diperoleh oleh BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan, yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

8.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid atau siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank/simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

8.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas Negara. Terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1068 tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama menyatakan bahwa tagihan atas UKT mahasiswa diakui sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

8.3 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU UIN dan atau hak BLU UIN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang dicatat dengan nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dalam bentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penyisihan piutang tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo.	5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

8.4 Beban Dibayar Dimuka

Pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka digunakan untuk membiayai kepentingan operasional jangka panjang BLU.

8.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan adalah aset yang digunakan kembali untuk proses operasi dalam rangka pemberian jasa kepada pihak ketiga. Adapun nilai persediaan yang disajikan pada laporan keuangan ini menyesuaikan dengan kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku pada instansi pemerintah. Pada saat pengakuan awal, persediaan diakui sebesar biaya perolehan (historical cost), yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai. Selanjutnya, persediaan dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Penyisihan atas persediaan usang dan bergerak lambat (slow moving) ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode pelaporan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian awal akan dibedakan dengan harga pembelian terakhir
- Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah barang yang dibeli lebih awal
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S 17/PB/PB.6/2021 mengenai Rilis Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 merupakan pengembangan dari Aplikasi Persediaan versi sebelumnya yang telah menggunakan metode penilaian First-In First-Out (FIFO), dimana metode penilaian yang sebelumnya digunakan adalah Harga Perolehan Terakhir (HPT). Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/20221 tanggal 22 Januari 2021, hal Penerapan Metode FIFO, bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Demikian pula untuk update Aplikasi SIMAK BMN versi 21.0.0.

8.6 Investasi Jangka Panjang

Adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.

8.7 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah dinilai dengan biaya perolehan, jika tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada tanggal perolehan, dan disajikan sebesar nilai moneterinya.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, dan disajikan sebesar nilai moneterinya. Terhadap Peralatan dan Mesin dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar (market data approach) dengan melakukan perbandingan harga penjualan peralatan dan mesin yang sejenis dan tahun yang sama.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan, maka didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada tanggal perolehan. Terhadap gedung dan bangunan dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan pendekatan biaya (cost approach), yaitu dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai dengan penilaian.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, termasuk di dalamnya Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Terhadap infrastruktur dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan biaya perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Aset tetap lainnya dinilai berdasarkan biaya perolehannya.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan, mencakup Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses Konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset - aset tersebut siap untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai Tahun Anggaran 2018 nilai satuan minimum aset tetap sebagai berikut:

a) Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk :

- a. Peralatan dan mesin; atau
- b. Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

b) Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk :

- a. Gedung dan Bangunan; atau
- b. Aset Tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

Penyusutan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK No. 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat penyusutan aset tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No. 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan Penghapusan.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat penyusutan aset tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan KMK No. 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen diberhentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Dacrah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Banguna Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilakukan pemanfaatan. Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutan adalah nol. Dalam hal aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.

8.8 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Penjabaran dari jenis-jenis aset lainnya antara lain sebagai berikut:

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hal kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam Pengembangan.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten, Brand/ Merk, Desain Industri, Resep Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

b) Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam aset lainnya aset tak berwujud, tagihan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya dan aset yang dikelola pihak lain.

8.9 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

9. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain:

- Utang Usaha yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional misalnya utang biaya.
- Utang Pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.

- c) Biaya yang Masih Harus Dibayar yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca termasuk accrued interest.
- d) Pendapatan Diterima di Muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai e) di atas.

Kewajiban Jangka Pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLU.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca apabila:

- a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLU pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, pada Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebagai berikut:

	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	74.114.280.000	74.114.280.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	74.114.280.000	74.114.280.000
Belanja		
Belanja Pegawai	77.292.004.000	69.199.301.000
Belanja Barang	93.062.433.000	105.354.760.000
Belanja Modal	1.315.219.000	8.022.892.000
Belanja Bantuan Sosial	15.602.400.000	15.602.400.000
Jumlah Belanja	187.272.056.000	198.179.353.000

Selama Tahun 2023, BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah melakukan revisi anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1.	10 Februari 2023	Revisi DIPA Pagu Tetap dan Halaman III. DIPA, revisi dilakukan berdasarkan perintah KPA untuk penyesuaian Program Kegiatan RKA-K/L dengan visi misi dan IKU Universitas, dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa masuk dalam anggaran pagu definitif yang kurang mencukupi sehingga tidak mengakomodir semua rencana kegiatan tersebut, serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk triwulan I sesuai surat dari
2.	24 Maret 2023	Revisi buka blokir di DJA Kemenkeu RI. Revisi dilakukan untuk membuka blokir pagu anggaran definitif tahun 2023 dengan difasilitasi oleh Pendis Kemenag RI
3.	17 April 2023	Revisi DIPA Pagu tetap dan halaman III. DIPA. Berdasarkan perintah rektor untuk melakukan revisi sesuai usulan permintaan dari fakultas dan unit-unit, serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk triwulan II sesuai surat dari Kanwil DJPB
4.	02 Mei 2023	Revisi DIPA pagu tetap berdasarkan perintah rektor untuk melakukan revisi pengadaan peralatan labor fakultas saintek berupa meja-meja laboratorium
5.	21 Juli 2023	Revisi Penggunaan Saldo Awal BLU dan penerimaan hibah serta Halaman III DIPA. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi penggunaan Saldo Awal BLU dan penerimaan hibah sebagai tambahan anggaran melaksanakan kegiatan operasional layanan berupa belanja modal dan belanja barang, juga penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) untuk triwulan III sesuai surat dari Kanwil DJPB
6.	28 Agustus 2023	Revisi DIPA Pagu Tetap. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi sesuai usulan permintaan dari Fakultas dan unit-unit
7.	12 Oktober 2023	Revisi Pusat untuk Penambahan Pagu belanja pegawai PPPK, tunjangan serdos dosen non PNS dan dosen Kopertais
8.	15 Oktober 2023	Revisi DIPA Halaman III. DIPA. Berdasarkan Surat Kanwil DJPB untuk melakukan revisi penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) untuk triwulan IV dalam rangka peningkatan IKPA UIN STS Jambi
9.	10 November 2023	Revisi DIPA Pagu Tetap. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi sesuai usulan permintaan dari PPK, Fakultas dan unit-unit
10.	08 Desember 2023	Revisi Relokasi Pagu Belanja Pegawai. Pagu belanja pegawai dikurangi pusat untuk relokasi belanja pegawai satker lain yang kurang dikarenakan pagu UIN telah mencukupi
11.	16 Desember 2023	Revisi Pemutakhiran POK. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi sesuai usulan permintaan dari PPK dan Koordinator Perencanaan dan Keuangan
12.	27 Desember 2023	Revisi Relokasi Pagu Belanja Pegawai kedua. Pagu belanja pegawai dikurangi pusat untuk relokasi belanja pegawai satker lain yang kurang dikarenakan pagu UIN telah mencukupi
13.	19 Januari 2024	Revisi pagu minus belanja pegawai

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp90.607.981.741 atau mencapai 122 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp74.114.280.000. Pendapatan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan PNPB Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

	2023		%Realisasi
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)			
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	72.600.000.000	81.860.091.031	113
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	36.000.000	43.000.000	119
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	234.000.000	231.566.535	99
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	242.000.000	435.156.867	180
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU	-	481.702.314	100
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	434.280.000	156.877.000	36
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	84.000.000	369.955.847	440
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	484.000.000	496.909.091	103
Pendapatan Lain-lain BLU	-	88.669.027	100
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri Lembaga Badan Usaha Uang	-	1.000.000.000	-
Jumlah Pendapatan BLU	74.114.280.000	85.163.927.712	115
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	210.627.000	100
Pendapatan Pemanfaatan BMN	-	2.778.777	100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	169.304.897	100
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	86.213.530	100
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	4.975.129.825	100
Jumlah PNPB Lainnya	-	5.444.054.029	100
Jumlah	74.114.280.000	90.607.981.741	122

Realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp90.607.981.741 dan Rp79.913.047.827. Realisasi pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 13 persen persen dari realisasi TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%Naik (Turun)
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)			
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	81.860.091.031	78.440.347.610	4
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -	43.000.000	24.220.000	-58
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	231.566.535	123.641.740	87
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	435.156.867	286.714.973	52
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU	481.702.314	149.596.734	222
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	156.877.000	86.050.000	82
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	369.955.847	66.600.000	455
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	496.909.091	344.094.200	44
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri Lembaga Badan Usaha Uang	1.000.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain BLU	88.669.027	14.390.000	516
Jumlah Pendapatan BLU	85.163.927.712	79.535.655.257	7
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	210.627.000	27.300.000	672
Pendapatan Pemanfaatan BMN	2.778.777	2.405.740	16
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	61.678.644	-100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	169.304.897	268.492.436	-37
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	86.213.530	17.515.750	392
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	4.975.129.825	-	100
Jumlah PNPB Lainnya	5.444.054.029	377.392.570	1343
Jumlah	90.607.981.741	79.913.047.827	13

b. Belanja

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp188.819.529.421 atau mencapai 95 persen dari anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp198.179.535 Belanja BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial. Rincian estimasi dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

	2023		
	Estimasi	Realisasi	%Realisasi
Belanja Pegawai	69.199.301.000	68.915.652.473	100
Belanja Barang	105.354.760.000	97.091.535.908	92
Belanja Modal	8.022.892.000	7.204.019.843	90
Belanja Bantuan Sosial	15.602.400.000	15.602.400.000	100
Total Belanja Kotor	198.179.353.000	188.813.608.224	95
Pengembalian Belanja	-	(5.921.197)	-
Belanja Netto	198.179.353.000	188.807.687.027	95

Realisasi belanja TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp188.807.687.027 dan Rp348.711.478.875. Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 46 persen dari realisasi TA 2022.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%Naik (Turun)
Belanja Pegawai	68.909.731.276	65.273.516.740	6
Belanja Barang	97.091.535.908	90.424.567.415	7
Belanja Modal	7.204.019.843	181.238.994.720	-96
Belanja Bantuan Sosial	15.602.400.000	11.774.400.000	33
Jumlah	188.807.687.027	348.711.478.875	-46

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.909.731.276 dan Rp65.273.516.740. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 6 persen dari realisasi TA 2022.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%Naik (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	59.997.809.561	59.479.754.755	1
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.862.381.900	4.980.994.150	38
Belanja Lembur	1.210.132.000	835.531.000	45
Belanja Tunjangan Khusus	845.329.012	-	100
Pengembalian Belanja Pegawai	(5.921.197)	(22.763.165)	-74
Jumlah	68.909.731.276	65.273.516.740	6

2) Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp97.091.535.908 dan Rp90.424.567.415 Realisasi belanja modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dari realisasi TA 2022.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%Naik (Turun)
Belanja Barang	12.018.658.040	13.571.912.419	-11
Belanja Jasa	752.831.149	2.507.379.235	-70
Belanja Pemeliharaan	2.623.926.952	3.061.997.228	-14
Beban Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.631.462.360	1.599.885.114	2
Belanja Barang untuk Persediaan	2.502.614.137	424.734.500	489
Belanja Barang BLU	77.562.043.270	69.258.658.919	12
Pengembalian Belanja Barang	-	-	0
Jumlah	97.091.535.908	90.424.567.415	7

3) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.204.019.843 dan Rp182.594.795.133. Realisasi jumlah belanja modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 96 persen dari TA 2022.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	<u>Realisasi TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>	<u>%Naik (Turun)</u>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.086.782.000	79.706.889.648	-99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	98.088.410.986	-100
Belanja Modal Lainnya	-	-	0
Belanja Modal - BLU	6.117.237.843	3.443.694.086	78
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
Jumlah	7.204.019.843	181.238.994.720	-96

4) Belanja Bantuan

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.602.400.000 dan Rp11.774.400.000. Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 33 persen dari Realisasi TA 2022.

	<u>Realisasi TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>	<u>%Naik (Turun)</u>
Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	15.602.400.000	11.774.400.000	33
Jumlah	15.602.400.000	11.774.400.000	33

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal pada tanggal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.847.480.065 dan Rp27.917.324.624.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Jumlah Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

c. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Jumlah Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(181.126.651) dan Rp(6.833.302.252).

d. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp98.018.578.635 dan Rp275.631.733.300. Jumlah Penyesuaian SILPA/SIKPA diketahui hanya berasal dari Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN, berikut rincian transaksi penyesuaian SILPA/SIKPA:

Penyesuaian SILPA/SIKPA

<u>Penyesuaian Transaksi BLU dengan BU</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Kenaikan/Penurunan</u>
Pendapatan Alokasi APBN	103.462.632.664	276.009.125.870	-62,5
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(5.444.054.029)	(377.392.570)	1342,5

e. Saldo Anggaran Lebih/ (Kurang) Akhir

Saldo anggaran lebih akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.666.353.414 dan Rp34.750.626.876.

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran		
UP Bendahara Pengeluaran	-	-
BPG 012 PT Bank Mandiri Persero Tbk. No. 110-00-0466829-6	-	-
	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

b. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp34.666.353.414 dan Rp34.847.480.065.

Rincian kas pada Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas pada Badan Layanan Umum		
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. No. Rekening 7005932388	13.473.154.110	4.227.715.240
- PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah No. Rekening 7001419026	17.188.992.344	30.619.764.825
- PT Bank Mandiri Tbk. No. Rekening 1100016298298	4.004.206.960	-
Jumlah	<u>34.666.353.414</u>	<u>34.847.480.065</u>

c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.139.289.573 dan

Rincian Kas lainnya dan setara kas sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas pada Unit	<u>1.139.289.573</u>	<u>621.452.600</u>
Jumlah	<u>1.139.289.573</u>	<u>621.452.600</u>

d. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo pendapatan yang masih harus diterima untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 382.128.000 dan Rp 458.533.500.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima muncul diakibatkan adanya mahasiswa yang belum membayarkan UKT sampai dengan 31 Desember 2023 dengan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
UKT Mahasiswa	382.128.000	458.533.500
Jumlah	<u>382.128.000</u>	<u>458.533.500</u>

e. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 41.250.000.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		
Piutang Sewa Tanah	42.500.000	82.500.000
Piutang Sewa Gedung	-	-
Piutang Sewa Lainnya BLU	-	-
Piutang Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah	<u>42.500.000</u>	<u>82.500.000</u>

Cadangan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU yang Tak Tertagih

Piutang Lancar	-	-
Piutang Kurang Lancar	-	-
Piutang Diragukan	-	(41.250.000)
Piutang Macet	(42.500.000)	-
Jumlah	(42.500.000)	(41.250.000)

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

	-	41.250.000
--	---	-------------------

f. Persediaan

Saldo persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 545.605.756 dan Rp 617.116.028 dengan rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Barang Konsumsi	545.605.756	617.116.028
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	545.605.756	617.116.028

g. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap - Bersih pada BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.082.162.795.105 dan Rp 1.109.844.203.327 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	373.107.997.000	-	-	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	121.952.647.980	4.318.065.390	-	126.270.713.370
Gedung dan Bangunan	652.385.105.745	2.799.420.203	-	655.184.525.948
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.063.019.923	1.173.698.490	-	17.236.718.413
Aset Tetap Lainnya	6.021.813.197	169.905.200	-	6.191.718.397
Konstruksi dalam	22.035.065.938	99.356.100	-	22.134.422.038
Jumlah	1.191.565.649.783	8.560.445.383	-	1.200.126.095.166
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	44.770.684.313	19.519.081.877	-	64.289.766.190
Gedung dan Bangunan	28.327.675.293	14.652.754.375	-	42.980.429.668
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.424.336.850	2.070.017.353	-	10.494.354.203
Aset Tetap Lainnya	198.750.000	-	-	198.750.000
Jumlah	81.721.446.456	36.241.853.605	-	117.963.300.061
Nilai Buku Bersih	1.109.844.203.327			1.082.162.795.105
Tahun 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	373.107.997.000	-	-	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	43.109.742.814	79.816.405.166	973.500.000	121.952.647.980
Gedung dan Bangunan	158.465.943.536	1.915.565.041.183	1.421.645.878.974	652.385.105.745
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.799.600.923	761.708.077	498.289.077	16.063.019.923
Aset Tetap Lainnya	5.661.113.197	360.700.000	-	6.021.813.197
Konstruksi dalam	415.908.946.084	-	393.873.880.146	22.035.065.938
Jumlah	1.012.053.343.554	1.996.503.854.426	1.816.991.548.197	1.191.565.649.783
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	33.788.128.904	11.956.055.409	973.500.000	44.770.684.313
Gedung dan Bangunan	18.644.288.155	9.699.360.561	15.973.423	28.327.675.293
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.691.433.364	1.732.903.486	-	8.424.336.850
Aset Tetap Lainnya	198.750.000	-	-	198.750.000
Jumlah	59.322.600.423	2.019.892.173.882	1.817.981.021.620	81.721.446.456
Nilai Buku Bersih	952.730.743.131			1.109.844.203.327

h. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.456.695.220 dan Rp 1.635.866.970 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Tak Berwujud	3.377.415.720	3.377.415.720
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	-	-
Akumulasi Amortisasi:		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.920.720.500)	(1.741.548.750)
Akumulasi Penyusutan:		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap YTDDOP	-	-
Jumlah	<u>1.456.695.220</u>	<u>1.635.866.970</u>

i. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.349.471.077 dan Rp 1.206.414.379.

Rincian utang kepada pihak ketiga, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	-	-
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa		
Pembayaran Berlangganan Telepon	5.348.202	5.783.322
Pembayaran Berlangganan Air	193.318.977	573.754.057
Pembayaran Berlangganan Air	11.514.325	5.424.400
Utang kepada pihak ketiga Lainnya		
Dana Pihak Ketiga Lainnya	1.139.289.573	621.452.600
Jumlah	<u>1.349.471.077</u>	<u>1.206.414.379</u>

j. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 125.375.000 dan Rp 103.902.777

Rincian pendapatan diterima dimuka, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sewa Lahan Gedung	122.041.667	103.902.777
Sewa Lahan Tanah	3.333.333	-
Jumlah	<u>125.375.000</u>	<u>103.902.777</u>

k. Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.118.495.892.991 dan Rp 1.146.755.585.334 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ekuitas Awal	1.148.269.399.944	982.590.534.190
Surplus/Defisit LO	(29.884.459.077)	164.108.164.566
Koreksi Penambahan (Pengurangan) Ekuitas:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	5.529.432
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(4.980.000)	33.857.146
Koreksi Lainnya	498.060.124	17.500.000
Jumlah	<u>1.118.878.020.991</u>	<u>1.146.755.585.334</u>

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 187.152.819.793 dan Rp 356.037.345.672, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan dari Alokasi APBN	103.462.632.664	276.009.125.870
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	80.259.921.452	78.898.881.110
Pendapatan Hibah BLU	1.650.000.000	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	285.575.535	147.861.740
Pendapatan BLU Lainnya	1.494.690.142	981.476.952
Jumlah	<u>187.152.819.793</u>	<u>356.037.345.672</u>

b. Beban Operasional

1) Beban Pegawai

Saldo beban pegawai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 107.707.810.160 dan Rp 101.374.099.940.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	59.991.888.364	59.456.991.590
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	845.329.012	-
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	6.862.381.900	4.980.994.150
Beban Lembur	1.210.132.000	835.531.000
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	38.643.407.896	36.100.583.200
Jumlah	<u>107.553.139.172</u>	<u>101.374.099.940</u>

2) Beban Persediaan

Saldo beban persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.533.108.409 dan Rp 879.514.386.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Persediaan Konsumsi	2.533.108.409	805.478.989
Beban Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	<u>2.533.108.409</u>	<u>805.478.989</u>

3) Beban Barang dan Jasa

Saldo beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 41.902.104.729 dan Rp 40.740.334.650.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Keperluan Kantor	1.916.635.000	1.796.800.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24.000.000	23.927.012
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.965.050.000	6.096.974.000
Beban Barang Operasional Lainnya	-	99.890.000
Beban Operasional Lainnya	-	36.622.339
Beban Bahan	941.727.740	2.418.001.068
Beban Honor Output Kegiatan	160.050.000	231.400.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.011.195.300	2.868.298.000
Beban Langganan listrik	-	1.938.492.249
Beban Langganan Telepon	75.257.629	88.376.764
Beban Langganan Air	121.118.325	277.205.396
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	44.988.000
Beban Sewa	4.750.000	25.500.000
Beban Jasa Profesi	557.360.000	491.050.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	59.600.000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-

Beban Barang BLU	8.909.836.596	8.005.178.690
Beban Jasa BLU	10.396.622.559	6.330.436.483
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.717.411.970	8.886.085.356
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	-	29.217.762
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	-	41.250.000
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakompatibel BLU	82.636.310	7.500.000
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	8.737.000	936.676.531
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin BLU	9.716.300	6.865.000
Jumlah	41.902.104.729	40.740.334.650

4) Beban Pemeliharaan

Saldo beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.576.903.800 dan Rp 4.172.186.228.

	2023	2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	474.949.500	265.001.500
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.148.977.452	2.654.141.728
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	142.854.000
Beban Pemeliharaan BLU	952.976.848	1.110.189.000
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-
Jumlah	3.576.903.800	4.172.186.228

5) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9.947.190.265 dan Rp 9.544.304.692.

	2023	2022
Beban Perjalanan Biasa	1.459.226.000	1.429.815.114
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	118.616.360	170.070.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.620.000	-
Beban Perjalanan BLU	8.315.727.905	7.944.419.578
Jumlah	9.947.190.265	9.544.304.692

6) Beban Bantuan Sosial

Jumlah beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 15.602.400.000 dan Rp 11.774.400.000.

	2023	2022
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk U	15.602.400.000	11.774.400.000
Jumlah	15.602.400.000	11.774.400.000

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 36.416.045.355 dan Rp 23.475.485.243.

	2023	2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.519.081.877	11.831.912.555
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.647.774.375	9.688.916.570
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan & Irigasi	2.070.017.353	1.732.903.486
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	179.171.750	219.639.250
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	2.113.382
Jumlah	36.416.045.355	23.475.485.243

8) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.250.000 dan Rp 41.250.000.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	1.250.000	41.250.000
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	-	-
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	-	-
Beban Penyisihan Piutang Sewa Lainnya BLU	-	-
Jumlah	<u>1.250.000</u>	<u>41.250.000</u>

c. Kegiatan Non-Operasional

Akun ini terdiri dari :

1) Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah surplus (defisit) dari penjualan aset non lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 210.627.000 dan Rp(123.938.098).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	210.627.000	27.300.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	151.238.098
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	<u>210.627.000</u>	<u>(123.938.098)</u>

2) Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah surplus (defisit) dari kegiatan non operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 284.235.860 dan Rp 122.296.734.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.728.289.889	499.689.304
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.444.054.029	377.392.570
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>284.235.860</u>	<u>122.296.734</u>

7. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

a. Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.812.266.192 mengalami penurunan sebesar 96,00 % dari 31 Desember 2022 sebesar Rp188.044.996.972 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arus Kas Masuk	193.859.987.405	355.894.873.697
Arus Kas Keluar	<u>(187.047.721.213)</u>	<u>(167.849.876.725)</u>
	<u>6.812.266.192</u>	<u>188.044.996.972</u>

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp193.859.987.405 dan Rp355.894.873.697, yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan dari Alokasi APBN	103.462.632.664	276.009.125.870
Pendapatan dari Jasa Layanan Masyarakat	81.860.091.031	78.440.347.610
Pendapatan Hasil Kerja Sama	274.566.535	147.861.740
Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000.000	797.849.173
Pendapatan dari Hibah	1.547.567.832	
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	481.702.314	149.596.734
Pendapatan PNBPN Umum	5.233.427.029	350.092.570
Jumlah	<u>193.859.987.405</u>	<u>355.894.873.697</u>

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp187.047.721.213 dan Rp167.849.876.725, yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pembayaran Pegawai	107.550.290.438	101.374.099.940
Pembayaran Barang	21.192.783.786	21.646.161.911
Pembayaran Jasa	11.522.948.788	8.879.065.718
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	2.502.614.137	1.196.180.310
Pembayaran Pemeliharaan	3.576.903.800	4.172.186.228
Pembayaran Perjalanan Dinas	9.947.190.265	9.544.304.692
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BI.U	9.708.535.970	8.886.085.356
Pembayaran Bantuan Sosial	15.602.400.000	11.774.400.000
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	5.444.054.029	377.392.570
Jumlah	<u>187.047.721.213</u>	<u>167.849.876.725</u>

b. Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(6.993.392.843) mengalami penurunan sebesar 96,14% dari Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp(181.211.694.720) dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arus Kas Masuk	210.627.000	27.300.000
Arus Kas Keluar	<u>(7.204.019.843)</u>	<u>(181.238.994.720)</u>
	<u>(6.993.392.843)</u>	<u>(181.211.694.720)</u>

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp210.627.000 dan Rp27.300.000 yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penjualan atas aset tetap lainnya/ Aset Lainnya	210.627.000	27.300.000
Jumlah	210.627.000	27.300.000

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.204.019.843 dan Rp181.238.994.720, yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	4.202.184.999	80.569.593.657
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.658.231.154	99.546.992.986
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.173.698.490	761.708.077
Perolehan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	169.905.200	360.700.000
Jumlah	7.204.019.843	181.238.994.720

c. Arus Kas Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris merupakan perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit ataupun saldo debit akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan atau pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp517.836.973 mengalami kenaikan sebesar 68,64% dari Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp355.459.400 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arus Kas Masuk	1.139.289.573	3.947.263.913
Arus Kas Keluar	(621.452.600)	(3.591.804.513)
	517.836.973	355.459.400

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.139.289.573 dan Rp3.947.263.913, yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.139.289.573	3.947.263.913
Jumlah	1.139.289.573	3.947.263.913

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp621.452.600 dan Rp3.591.804.513, yang berasal dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	621.452.600	3.591.804.513
Jumlah	621.452.600	3.591.804.513

d. Kas Pada Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp35.805.642.987 dan Rp35.468.932.665, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal kas per 1 Januari	35.468.932.665	28.280.171.013
Kenaikan (Penurunan) Kas	336.710.322	7.188.761.652
Saldo Akhir Kas per 31 Desember	35.805.642.987	35.468.932.665

8. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.148.269.399.944 dan Rp 982.590.534.190

b. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Surplus sebesar Rp (29.884.459.077) dan Rp 164.108.164.566.

c. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

d. Koreksi atas Reklasifikasi

Selisih revaluasi aset tetap merupakan nilai koreksi atas reklasifikasi aset diakibatkan adanya kesalahan dalam penginputan kode barang. Nilai revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 5.529.432.

e. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp 4.980.000 dan Rp 33.857.146.

Rincian koreksi atas reklasifikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gedung dan Bangunan	-	-
Peralatan dan Mesin	-	33.857.146
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.980.000	-
	<u>4.980.000</u>	<u>33.857.146</u>

f. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp 498.060.124 dan Rp 17.500.000.

Rincian koreksi lain-lain adalah sebagai berikut

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Pendapatan Piutang Sewa Tanah Tahun Lalu	-	17.500.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional I	60.124	-
Hibah Gedung & Bangunan	498.000.000	-
	<u>498.060.124</u>	<u>17.500.000</u>

g. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 1.118.878.020.991 dan Rp 1.146.755.585.334.

8. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen BLU UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2024.